

EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhammad Ananda Lody¹, Syahrani², Cathas Teguh Prakoso³

Abstrak

Penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan mengetahui faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis model interaktif. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* ialah Kepala Bidang pembinaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dari segi evaluasi konteks tidak memberikan peningkatan yang baik dalam segi bantuan dana kesehatan dan kesejahteraan untuk masyarakat, tapi tanggapan masyarakat sangat positif dengan adanya program BSPS ini. Dari evaluasi proses dan evaluasi produk persyaratan yang diberikan pemerintah sangat susah dan pengerjaan rumah tidak sesuai jadwal yang telah di tentukan. Banyak masyarakat tidak puas dengan hasil pengerjaan program BSPS ini, karena masih banyak kekurangan dalam pengerjaannya di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Pendahuluan

Kehidupan yang layak adalah keinginan semua orang di dunia. Permasalahan kemiskinan yang saat ini menjadi permasalahan utama yang ada di kalangan masyarakat, dimana untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial ini perlu penanganan khusus oleh pemerintah agar dapat mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, untuk mencapai sasaran mengurangi angka kemiskinan maka banyak

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Lodyananda17@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

hal yang harus dilakukan yaitu mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat sehingga melalui program pemerintah kemiskinan bisa diatasi.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara angka kemiskinan tahun 2015 sangat tinggi yaitu salah satunya Kecamatan Tenggarong. dimana angka masyarakat miskin sangat tinggi. Yaitu mencapai 79.387 jiwa ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengurangi angka kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat, yang kehidupan sosialnya masih dibidang jauh dari kata mampu. Maka peran pemerintah dilihat apakah bisa menangani kesenjangan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara antara yang miskin dan yang kaya sehingga pemerintah mampu menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga masyarakat bisa merasakan Rumah Layak Huni dan lingkungan hidup yang sehat.

Data Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan jumlah masyarakat miskin yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara jumlah rumah tangga yang ada diseluruh kecamatan ada 23.089, sedangkan jumlah kepala rumah tangga ada 23.365 dan jumlah anggota rumah tangga miskin yaitu 79.387 jiwa.

Sedangkan data jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Tenggarong jumlah rumah tangga di setiap kelurahan ada 1.776, dan jumlah kepala keluarga 1.783, untuk jumlah masyarakat miskin ada 5.995 jiwa di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas menyebutkan pada alenia ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan pasal 27 ayat 2 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan selain itu pasal 28 H ayat 1 menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Program BSPS ini berjalan sejak tahun 2015 sampai saat ini. Tujuan dari program BSPS ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat atau membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni sehingga masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak selain itu tujuan dari program ini adalah untuk mengungarangi rumah kumuh di Kecamatan Tenggarong serta mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara yaitu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan sebagai palaksana atau yang menjalankan program BSPS ini adalah SKPD Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Data Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Tenggarong 2015-2018, masyarakat

yang mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Tenggarong tahun 2015 ada 211 rumah, dan 2016 0, di 2017 ada 114 rumah, dan 2018 jika ditotal ada 180 rumah yang mendapatkan bantuan BSPS dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Target program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tahun 2014 tidak ada, tahun 2015 224 rumah, tahun 2016 ada 201 rumah 2017 ada tiga kelurahan yaitu masing-masing Jahab 64, Bukit Biru 30, Loa Tebu 54. Tahun 2018 Jahab 70, Loa Tebu ada 50, Loa Ipuh Darat 30, dan Timbau 30 rumah. Sedangkan di tahun 2019 ada di Loa Ipuh 30 rumah dan Rapak Lambur 50 rumah.

Peran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menanggulangi kemiskinan sangatlah penting maka pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melakukan program bedah rumah untuk mengurangi kemiskinan. Keterlambatan dalam pengumpulan data administrasi yang diminta oleh pihak Disperkim untuk memperoleh program, dikeluhkan pemerintah dalam menindaklanjuti program BSPS ini.

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi dievaluasi dalam kebijakan publik yaitu adalah 1, evaluasi proses dan yang ke 2, evaluasi formatif dan sumatif. Dimensi tersebut adalah evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan. Dari sini kita akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektivitas dan efisiensi, dan lain sebagainya yang terkait. Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan itu sendiri serta kandungan programnya. Dari sini kita akan memperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak (*outcome*) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan) dan lain-lain.

Kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi antara lain yaitu evaluasi formatif yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung di sini saya menggunakan 2 buah dimensi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Tujuan evaluasi formatif ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi-kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen evaluasi formatif adalah *monitoring* terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi. Sedangkan evaluasi sumatif yang dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak *outcome* kebijakan. Tujuan evaluasi sumatif ini adalah untuk mengukur bagaimana efektivitas kebijakan/program tersebut memberi dampak yang nyata pada problem yang ditangani.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Faktor apa yang menyebabkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mencapai target?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Dye (dalam Islamy 2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government chooseto do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Menurut Ripley (dalam Winarno 2007:99) kebijakan publik sebaiknya dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi antara aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Nugroho (2011:96) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masa masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011:93) kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.

Evaluasi Kebijakan Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Winarno 2008:166), secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Arikunto (2010:1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai bekerjanya sesuatu yang selanjutnya

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2008:166) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.

Evaluasi Program

Evaluasi merupakan alat untuk menganalisis dan menilai fenomena dan aplikasi ilmu pengetahuan. Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mandiri, ilmu evaluasi didukung oleh sejumlah teori.

Menurut Cronbach dan Stufflebeam (dalam Arikunto dan Jabar 2009:5) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.

Dari teori di atas evaluasi program yaitu kegiatan atau program yang terstruktur dalam jangka waktu yang lama sehingga program ini berkesinambungan yang melibatkan banyak instansi-instansi terkait, selain itu direncanakan sejak jauh-jauh hari atau sejak sebelum kebijakan program ini dikeluarkan. Evaluasi program juga melihat dampak kebijakan yang telah diterapkan atau di jalan kan serta menilai dari kebijakan program tersebut.

Indikator Evaluasi Program

Terdapat 4 langkah dalam evaluasi kebijakan atau program, yakni:

1. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)
Tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Arikunto dan Safrudin (2009:124) menjelaskan bahwa, evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.
2. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)
Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi *input*, atau evaluasi masukan. Menurut Widoyoko, (2009:234) evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternative apa yang

diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

3. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)

Menurut Widoyoko, (2009:137) menjelaskan bahwa, evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan : “ 1) *do detect or predict in procedural design or its implementation during implementation stage*, 2) *to provide information for programmed decision*, and 3) *to maintain a record of the procedure as it occurs* “. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi.

4. *Product Evaluation* (Evaluasi Produk/Hasil)

Menurut Widoyoko, (2009:598) memberikan pengertian evaluasi produk/hasil adalah sebuah proses yang diharapkan dapat membantu pimpinan proyek atau untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program. Sementara menurut Napis (dalam Widoyoko 2000:14) menerangkan, evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Dari pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan menkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang terjadi sebenarnya di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

Context adalah memberikan gambaran rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi yang obyektif yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini adalah Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapat bantuan program BSPS sangat penting dalam kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dalam program ini. Jika di amati lebih jauh lagi maka masih banyak kekurangan yang sangat yang berarti dalam peningkatan dalam program BSPS Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini merupakan bentuk realisasi dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Adanya program ini diharapkan kemiskinan di daerah bisa menurun.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis konteks bantuan program BSPS ini sangat positif karena program ini tepat sasaran. Karena bantuan program BSPS ini konteksnya untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang tidak mampu mendirikan atau memperbaiki rumahnya. Di sini juga pemerintah memberikan bantuan swadaya agar masyarakat bisa mandiri membangun rumahnya sendiri, serta aspek yang ada di dalam meliputi rumah yaitu kesehatan dan kesejahteraan bisa terwujud. Positifnya program ini tiap tahunnya selalu ada peningkatan jumlah kuota penerima bantuan rumah layak huni di kecamatan tenggarong khususnya. Dari konteks program tersebut sudah sangat baik.

Arikunto dan Safrudin (2009:124) menjelaskan bahwa, evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

Jadi dapat dikatakan dalam perencanaanya sudah sangat baik sesuai apa yang diinginkan dalam evaluasi konteks yang menggambarkan tentang kebutuhan masyarakat dalam hal konteks program bantuan rumah layak huni tersebut. Selain itu dalam peningkatan kebutuhan akan rumah layak huni pemerintah melalui program BSPS ini bisa mengetahui apa saja yang kurang di dalam konteks program ini. Sehingga apa yang diinginkan masyarakat bisa terwujud.

Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Input adalah meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus di pertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. BSPS Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan pengumpulan data program BSPS Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara untuk sumber daya dan segala unsur pendukungnya sudah sangat baik dalam penerapan program bantuan

BSPS ini. Pihak pemerintah sudah sangat matang dalam merancang kebijakan mulai dari sumber daya manusianya (SDM), sampai penganggaran dana yang akan disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan, serta unsur-unsur pendukung yang terlibat di dalamnya seperti fasilitator yang mensurvei rumah masyarakat yang layak diberikan program bantuan. Dan toko bangunan atau material yang ditunjuk oleh pihak terkait. Selain itu syarat dan prosedur yang ditetapkan pemerintah tersusun dengan baik sesuai alur prosedur (SOP) didalam pelaksanaannya.

Jika membicarakan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, serta bahan bangunan atau material dari pemilik rumah dan pihak pemerintah bisa menghitung dan barang apa saja yang akan dikirim untuk pelaksanaan pengerjaan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan bahan material dan biaya yang diberikan pihak pemerintah sebagai pelaksana program bantuan rumah layak huni. Permasalahan dalam penyelesaian pengerjaan juga menjadi sorotan masyarakat dalam program bantuan rumah layak huni.

Tahap kedua dari model CIPP adalah evaluasi *input*, atau evaluasi masukan. Menurut Widoyoko, (2009:234), evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi: 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana atau anggaran, dan 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

Untuk input masukan serta kebijakan pemerintah sudah sangat baik apa sesuai apa yang ada di dalam teori yaitu cara pihak pemerintah dalam mengambil keputusan hingga menentukan opsi apa yang cocok dalam program bantuan rumah layak huni. Serta kebutuhan apa saja yang diperlukan masyarakat dalam pelaksanaan pengerjaannya, tetapi dalam teorinya tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat di mana masih banyak SDM sumber daya manusia yang kurang dalam pelaksanaannya alat dan sarana prasarana yang kurang hingga anggaran yang kurang di dalam pelaksanaan program BSPS ini.

Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki pada Program BSPS Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil penelitian di dalam tahapan proses pemerintah hanya mengalami sedikit kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu soal pemberkasan masyarakat yang belum lengkap maka pemerintah harus juga ikut turun tangan

dalam penyelesaian permasalahan berkas masyarakat untuk proses yang telah dilakukan pemerintah sesuai apa yang ada ditatanan proses pelaksanaan program yang disosialisasikan kepada masyarakat.

Yaitu ada keterbatasan dana yang membuat masyarakat mengeluhkan didalam proses pelaksanaan pengerjaan rumah mereka. Dan material yang kurang sangat dikeluhkan masyarakat dan keterlambatan bahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu proses pengerjaan rumah mengalami keterlambatan yang sudah dijadwalkan penyelesaian pengerjaannya. Di sini bisa disimpulkan bahwa dalam prosesnya program BPS ini masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.

menurut Arikunto, (2009: 129) evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (*when*) kegiatan akan selesai.

Dapat kita lihat dalam pelaksanaannya tidak semulus yang dilihat yaitu evaluasi proses masih banyak kekurangan di dalam proses pelaksanaan program rumah layak huni apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan masyarakat jauh dari kata baik. Masyarakat banyak kecewa dengan proses pelaksanaannya program bantuan rumah layak huni tersebut waktu pengerjaan yang molor membuat masyarakat kecewa dalam proses penyelesaian rumah mereka.

Evaluasi Produk/Hasil (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi atau bahkan dihentikan. Produk yang dihasilkan yaitu berupa bantuan material dan uang yaitu seperti rumah yang sudah dikerjakan oleh pemiliknya melalui swadaya atau membayar tukang bangunan selain itu juga mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta prasarana, sarana dan utilitas.

Pemerintah menganggap hasil dari program bantuan stimulan perumahan swadaya sudah berhasil dan masyarakat sangat puas dengan hasil pelaksanaan program bantuan rumah layak huni, tetapi pemerintah tidak menutupi untuk tujuan yang mereka inginkan belum tercapai. masih banyaknya rumah tidak layak huni, mungkin dengan penambahan kuota bisa mencapai target yang di inginkan pihak pemerintah. Kesimpulannya adalah pemerintah mengaku bahwa hasil dari program ini sudah sangat baik dan untuk rumah sudah layak huni.

Hasil dari pelaksanaan program BPS ini masyarakat menyebut masih banyak kekurangan dalam proses pelaksanaan program bantuan ini. Dan yang

paling ditekankan lagi oleh masyarakat adalah dana bantuan yang kurang dalam pelaksanaan seperti pembelian bahan material dan upah tukang.

Menurut Widoyoko, (2000:14) menerangkan, evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Dari pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan.

Jadi jika dilihat dari hasil produk program ini sangat mengecewakan masyarakat. Karena hasil dari program ini tidak sesuai ekspektasi masyarakat yang menginginkan rumahnya sempurna atau keseluruhan rumahnya di rehabilitasi masih banyak rumah masyarakat yang bilang jika bisa ditambah untuk dana ditambah karena dana atau bahan material yang diberikan kepada masyarakat tidak cukup untuk memperbaiki rumahnya banyak kesalahan perhitungan dana dan bahan material maka terjadi permasalahan bahan yang kurang dan lain-lainya, semoga kedepannya program ini bisa lebih baik lagi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Dalam Evaluasi Konteks, Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin Dalam perencanaanya sudah sangat baik sesuai apa yang ada di dalam teori sudah menggambarkan tentang kebutuhan masyarakat dalam hal konteks program bantuan rumah layak huni tersebut. Selain itu dalam peningkatan kebutuhan akan rumah layak huni pemerintah melalui program BSPS ini bisa mengetahui apa saja yang kurang di dalam konteks program ini. Sehingga apa yang diinginkan masyarakat bisa terwujud.
 - b. Dalam Evaluasi Masukan, Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin Untuk input masukan serta kebijakan pemerintah sudah sangat baik apa sesuai apa yang ada di dalam teori yaitu cara pihak pemerintah dalam mengambil keputusan hingga menentukan opsi apa yang cocok dalam program bantuan rumah layak huni. Serta kebutuhan apa saja yang diperlukan masyarakat dalam pelaksanaan pengerjaannya, tetapi dalam teorinya tidak sesuai apa yang diharapkan

- oleh masyarakat di mana masih banyak SDM sumber daya manusia yang kurang dalam pelaksanaannya alat dan sarana prasarana yang kurang hingga anggaran yang kurang di dalam pelaksanaan program BSPS ini.
- c. Dalam Evaluasi Proses, Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin Dapat dilihat dalam pelaksanaannya tidak semudah teorinya masih banyak kekurangan di dalam proses pelaksanaan program rumah layak huni apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan masyarakat jauh dari kata baik. Masyarakat banyak kecewa dengan proses pelaksanaannya program bantuan rumah layak huni tersebut waktu pengerjaan yang molor membuat masyarakat kecewa dalam proses penyelesaian rumah mereka.
 - d. Dalam Evaluasi Produk/Hasil, Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin Tidak sesuai seperti teorinya hasil produk program ini sangat mengecewakan masyarakat. Karena hasil dari program ini tidak sesuai ekspektasi masyarakat yang menginginkan rumahnya sempurna atau keseluruhan rumahnya di rehabilitasi masih banyak rumah masyarakat yang bilang jika bisa ditambah untuk dana ditambah karena dana atau bahan material yang diberikan kepada masyarakat tidak cukup untuk memperbaiki rumahnya.
2. Faktor yang menyebabkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat miskin di Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mencapai target
- a. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang dalam pelaksanaan di lapangan sehingga ini menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan rumah layak huni masyarakat yang mendapatkan program bantuan BSPS ini.
 - b. Kurangnya dana atau bahan material bangunan yang diberikan pemerintah kepada pihak penerima bantuan rumah layak huni sehingga berpengaruh kepada proses pembangunan rumah tersebut. Dana yang akan disalurkan pemerintah kepada masyarakat mengalami keterlambatan
 - c. Selain itu data masyarakat yang sangat sulit untuk dikumpul karena banyak data atau berkas persyaratan masyarakat yang belum lengkap, serta kuota program bantuan yang terbatas dari pemerintah pusat di mana masyarakat yang ingin mendapatkan program sangat banyak.
 - d. Proses pengerjaan yang tidak sesuai jadwal target pemerintah ini menjadi sorotan masyarakat yang sudah mendapatkan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS).

Saran

1. Dari evaluasi konteks Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin konteks kebutuhan akan rumah layak huni sangat bagus karena mengingat banyaknya masyarakat di Kecamatan Tenggarong memiliki rumah tidak layak huni, sebaiknya program ini ditingkatkan lagi melalui pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar memberikan suntikan dana melalui program BSPS ini.
2. Dalam Evaluasi Masukan Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin yaitu untuk sumber daya manusianya SDM lebih ditingkatkan lagi agar proses pelaksanaan program ini berjalan dengan baik, serta dana yang diberikan atau bahan material ditambahkan agar tahap yang diinginkan oleh pemerintah pusat seperti rehab atap, dinding, dan lantai bisa terpenuhi dengan anggaran yang memadai.
3. Untuk Evaluasi Proses SOP atau standard operasional prosedurnya lebih jelas karena sangat menyulitkan masyarakat yang ingin mengajukan syarat sebagai penerima program bantuan BSPS, untuk pencairan dana juga harus dipercepat agar pengerjaannya terlaksana dengan cepat sehingga tidak ada keterlambatan dalam proses penyelesaian rumah, untuk dana sebaiknya langsung diberikan satu tahap jika diberikan dua tahap kesian masyarakat menunggu uang yang belum masuk rekening mereka untuk membayar upah tukang sebaiknya untuk dana diberikan sekaligus.
4. Untuk Evaluasi Produk/Hasil masih banyak masyarakat yang merasa belum puas dengan program BSPS ini. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kukar bisa meningkatkan kepuasan masyarakat sehingga dengan adanya program BSPS ini masyarakat bisa merasa puas setelah rumahnya di rehabilitasi yaitu mungkin dengan suntikan dana dari perusahaan batu bara yang ada di wilayah Kukar.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi dan Cipi Safrudin Abdul Jabar. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi dan Safruddin, Cipi 2009, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik*

(Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi). Jakarta : PT Alex Media Komputindo

Widyoko, Eko Putro. 2009. *Evaluasi Program Pembelajaran (Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Konsep*. Yogyakarta : Medpres
_____. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita